

EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI

SUNGGUMINASA



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar

Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum

Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar

Oleh:

SITI KHADIJAH

NIM: 10500112014

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

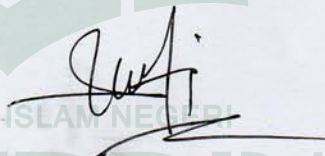
2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“EKSEKUSI RIIL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SUNGGUMINASA”**, ini adalah benar-benar hasil karya sendiri. Dan jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain baik sebagian maupun keseluruhan. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Makassar, 13 Maret 2016

Penyusun



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SITI KHADIJAH
NIM: 10500112014

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Eksekusi Rill dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa**”, yang disusun oleh Siti Khadijah, NIM: 10500112014, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 1 Juni 2016 M, bertepatan dengan 15 Syaban 1437 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum (dengan beberapa perbaikan).

Samata, 20 Juni 2016 M
15 Ramadhan 1937 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag (.....)
Sekretaris : Dr. Hamsir, M.Hum (.....)
Munaqisy I : Ahkam Jayadi, S.H., M.H (.....)
Munaqisy II : Dr. Hamzah Hasan, M.Hi (.....)
Pembimbing I : Dr. Marilang, S.H., M.Hum (.....)
Pembimbing II : Dr. H. M. Saleh Ridwan, M.Ag (.....)



Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag
NIP: 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Eksekusi Riil Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Sungguminasa”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana pendidikan bagi mahasiswa program S1 pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada:

1. Kedua orang tuaku Bapak dan Ibu yang saya hormati dan tercinta Bapak Haeruddin Radjab dan Murniati. Kakakku Syahrir, Damayanti, Srimurti, Warda Susaniati, Dedyng W. Atabay, Sukmawati, Syamsul terkasih dan tersayang. Terima kasih penyusun haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan, dan motivasi serta memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku pimpinan tertinggi beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamduddin, M.Ag. selaku Dekandan Jajaran Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Marilang, SH., M.Hum. Selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H.Saleh Ridwan, M.Ag. selaku pembimbing II yang telah dengan sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.
5. Ibu Istiqamah, SH., MH. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum serta staf Jurusan Ilmu Hukum.
6. Dosen-dosen jurusan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penyusun. Semoga ilmu yang mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami. Amin.
7. Bapak dan Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
8. Bapak Mochammad Djoenaedi, SH., MH, selaku Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan seluruh staf yang bertugas yang telah memberikan izin, fasilitas, waktu dan tempat bagi penyusun untuk meneliti.
9. Teman-teman Fakultas Syariah dan Hukum. Khususnya Jurusan Ilmu Hukum 1,2 angkatan 2012 yang telah membantu, memberikan semangat kepada penyusun, yang namanya task sempat saya sebutkan satu demi satu.

10. Sahabat-sahabatku di Ilmu Hukum 1.2, Andi Bau Utari, Kamelia Karim, Fatihani Baso, Nuriasmin, Nirwana, Kasmawati Arpa, Ummuh Kalsum, Astuti Arif, Rahmawati Idrus, Rafik, dan Hendra yang saya sayangi dan saya cintai yang telah membantu selama perkuliahan sampai sekarang ini.
11. Teman-teman seperjuangan KKN Profesi, khususnya teman-teman KKNP Angkatan VI Pengadilan Negeri Sungguminasa, Andi Bau Utari, Nuriasmin, Nurul Kurnia, Riswandi, Fiqih Jabbar, Andi Widianawati, Rosdiana, Ummuh Kalsum, Miftahuddin, Nova Noviasa, Muh Arif, Siti Khadijah Nurfajrin, yang selalu memberikan inspirasi kepada penyusun untuk semangat berjuang dengan kekuatan kebersamaan dan persaudaraan.
12. Kakak terbaik Kakak Noval, Kakak Yusran, Kakak Fauzan, Kakak Irsan, Kakak Yogi, Kakak Nicong, Kakak Eka, Kakak Rabita, Kakak Ana, yang jauh dimata namun dekat dihati yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan motivasi kepada penyusun selama penyusunan skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, yaitu ayahanda Ismail Suneth, SH., MH. dan ibunda Sabriah A.Md. Dan juga kepada saudara tercinta Nurul Okta Hasni Suneth, Nur Ikhsan Manggapati Suneth, Dan Nur Hakim Manggapati Suneth. Penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan serta doa restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan hukum ini. Semoga penyusunan hukum ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 22 September 2016

Penyusun

Siti Khadijah
NIM.10500112014



DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1-8
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	9-30
A. Pengertian Eksekusi	9
B. Macam-Macam Eksekusi	10
C. Pengertian Eksekusi Riil	11
D. Sumber Hukum Eksekusi	12
E. Asas-Asas Eksekusi.....	14
F. Ruang Lingkup Eksekusi Riil	19

G. Proses Eksekusi Riil	21
H. Tinjauan Eksekusi Menurut Hukum Islam.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31-33
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34-60
A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa.....	34
B. Ruang Lingkup Eksekusi Riil	39
C. Proses Eksekusi Riil.....	43
D. Faktor yang Mempengaruhi Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa	52
BAB V PENUTUP.....	61-62
A. Kesimpulan.....	61
B. Implikasi Penelitian.....	62
KEPUSTAKAAN	63
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....

ABSTRAK

Nama : Siti Khadijah

NIM : 10500112014

Judul : Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan masih sering dijumpai pihak yang kalah tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang menang menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat menyelesaikan persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan tidak lancar.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pengumpulan data melalui penelitian empiris (*empirical research*) bertujuan untuk melakukan observasi dan wawancara, terhadap narasumber yang dianggap mampu memberikan sejumlah informasi terkait eksekusi riil. Pendekatan penelitian adalah pendekatan yuridis empiris.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ruang lingkup eksekusi riil, proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ruang lingkup eksekusi riil yang terjadi di lapangan adalah menyerahkan barang tidak bergerak dalam bentuk pengosongan dan pembongkaran. Adapun proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri sungguminasa, yaitu permohonan eksekusi, *aanmaning* (peneguran), sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan eksekusi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi eksekusi dipicu oleh faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat yaitu faktor penundaan eksekusi karena adanya perlawanan, faktor ketiadaan biaya, faktor masyarakat melakukan perlawanan secara fisik, faktor kesalahpahaman terhadap budaya, faktor adanya campur tangan pihak ketiga. Sedangkan faktor yang mendukung eksekusi riil yaitu faktor termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan, dan faktor dukungan dari aparat penegak hukum.

Implikasi dari penelitian ini adalah aparat penegak hukum untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta memberikan penyuluhan hukum untuk taat terhadap hukum. Pihak termohon eksekusi hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya eksekusi. Selain itu, daalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Kata Kunci: Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum, bukan politik ataupun ekonomi.

Peraturan perundang-undangan dibuat berdasarkan konstitusi untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Selain itu dibutuhkan lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan:

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Republik Indonesia.

Khususnya pada perkara perdata, peraturan hukum yang mengatur bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan bagaimana pengadilan harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya aturan hukum perdata, hukum yang mengatur hal tersebut disebut hukum acara perdata.

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Setiap orang yang merasa dirugikan hak perdatanya dapat mengajukan tuntutan hak ke pengadilan untuk menyelesaikan perkaranya. Ada dua jenis tuntutan

hak yang diajukan ke pengadilan, yaitu pertama tuntutan hak yang mengandung sengketa yang disebut gugatan, dan yang kedua tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan.

Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan diakhiri dengan putusan yang dikeluarkan oleh hakim, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Pihak yang kalah harus melaksanakan putusan tersebut, sebagaimana yang terdapat dalam QS. al- Nisā'/4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *ulil amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹

Ayat di atas memerintahkan kaum mukminin untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, serta tunduk kepada *ulil amri* (pemimpin).

Pemimpin dalam segala aspek, jika dalam sebuah negara yang dimaksud pemimpin adalah presiden dan ketika dalam persidangan yang dimaksud pemimpin adalah hakim sebagai pimpinan sidang tertinggi atau pemberi keputusan. Keputusan yang ditetapkan hakim harus ditaati atau diikuti.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h.87.

Apabila ketaatan kepada pemimpin tidak mengandung atau mengakibatkan kedurhakaan, maka mereka wajib ditaati, walaupun perintah tersebut tidak berkenan dihati yang diperintah. Dalam konteks ini Nabi saw. bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya:

Wajib atas setiap muslim mendengar serta taat kepada perintah pemimpin dia suka atau tidak kecuali dia diperintahkan supaya melakukan maksiat. Sekiranya dia diperintahkan supaya melakukan maksiat maka janganlah dia dengar dan menaatinya”. (HR. Bukhari dan Muslim melalui Ibn ‘Umar).²

Namun jika Hakim menjatuhkan putusan tidak berpegang teguh kepada al-Qur’an dan hadits dan sebuah urusan diberikan pada yang bukan ahlinya bisa saja Hakim tersebut akan memberikan kuputusan yang salah. Sebagaimana Rasulullah saw. bersabda yang berbunyi:

إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

Artinya:

“Jika sebuah urusan diberikan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kehancuran”.³

Tentu saja Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengetahui soal hukum, mengetahui duduk perkaranya. Apabila putusan dikeluarkan oleh orang yang memahami masalah maka kewajiban kita untuk menerima putusan tersebut.

²Jabal, *Shahih Bukhari Muslim* (Bandung: Jabal, 2011), h. 344.

³Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah bin Bardizbah, *Shahih al-Bukhary* (Cet. I: Beirut: Dar al-Fikr, t.th), Juz I. h.21.

Dalam perkara perdata, jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap secara sukarela, maka pihak yang menang dapat meminta pengadilan untuk melakukan eksekusi dengan cara paksa sebagaimana diatur oleh undang-undang seperti mengajukan permohonan eksekusi, membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi tersebut dan sebagainya. Selanjutnya apabila semua persyaratan serta tahapan-tahapan untuk persiapan eksekusi telah terpenuhi maka pengadilan akan segera melakukan eksekusi dimana bila memungkinkan eksekusi akan dilakukan secara riil atau bisa juga eksekusi dengan pembayaran sejumlah uang.⁴

Sebagaimana diatur pada Pasal 196 *HIR*, berbunyi:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (*Rv.* 439, 443; *IR.* 94, 113, 130.).

Namun pada kenyataannya masih sering dijumpai pihak yang kalah (tereksekusi) tidak memenuhi isi putusan secara sukarela. Sehingga pihak yang menang menjadi pihak yang dirugikan. Agar isi putusan tersebut dapat dilaksanakan maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.

Namun biasanya pengajuan permohonan eksekusi tidak lantas dapat menyelesaikan persoalan. Eksekusi dengan bantuan pengadilan masih sering berjalan tidak lancar.

⁴Herman Supriyadi, "Pelaksanaan Putusan Perdata dan Pelaksanaannya", *Situs Resmi Pengadilan Agama Sarolangun*. <http://pa-sarolangun.go.id/index.php/122-berita2014/464-artikel-waka-3> (5 januari 2016).

Contoh kasus eksekusi tanah seluas 1,85 hektare di kelurahan Tompobolang, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan berlangsung ricuh. Sengketa tanah antara Saguni Dg Ngalle melawan Sangkala yang dimenangkan oleh Sangkala. Kericuhan yang terjadi karena pihak yang kalah menghalau dan melempari Jurusita dan Polosi dengan batu. Akibatnya, seorang anggota polres Gowa yang bernama AKP Syahrul mengalami luka dibagian kepala.⁵

Dalam uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji atau meneliti masalah ini serta memaparkan masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa”**.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus pada penelitian ini adalah pada eksekusi riil dalam perkara perdata dan untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penyusun akan mengemukakan beberapa pengertian kata dan istilah yang terdapat dalam skripsi ini.

Kata “Eksekusi Riil” yaitu berupa pelaksanaan prestasi dengan bantuan pihak pengadilan yang dibebankan kepada debitur untuk melaksanakan putusan pengadilan secara langsung.

Kata “Perkara Perdata” adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dalam hubungan keperdataan.

⁵Deddi Bayu, “Eksekusi Tanah di Gowa Berlangsung Ricuh”, *Skalanews.com*, 04 Juli 2012. <http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/116829-eksekusi-tanah-di-gowa-berlangsung-ricuh> (07 Maret 2016).

C. Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ruang lingkup eksekusi riil?
2. Bagaimana proses eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa?
3. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa?

D. Kajian Pustaka

Dari beberapa penelusuran yang telah dilakukan, tidak ditemukan penelitian yang secara spesifik sama dengan penelitian ini. Namun, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. M. Yahya Harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata.⁶ Buku ini khusus membahas permasalahan hukum dan praktik yang berkenaan dengan seluk-beluk eksekusi dalam bidang hukum perdata. Sedangkan penyusun membahas ruang lingkup eksekusi riil, proses eksekusi riil, dan faktor apa saja yang mempengaruhi eksekusi riil.
2. Umar Dani, Putusan Pengadilan *Non-Executable* Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN.⁷ Buku ini menjelaskan tentang penyelesaian putusan yang tidak dapat dilaksanakan secara sempurna (*non executable*).

⁶ M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta:Sinar grafika, 2006).

⁷Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN* (Yogyakarta:Genta Press, 2015).

Sedangkan dalam skripsi ini membahas pada persoalan eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.

3. Skripsi Iin Fatimah, “Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata”.⁸ Skripsi ini lebih memaparkan tentang proses pemulihan hak akibat eksekusi bagi tergugat karena adanya putusan peninjauan kembali pada perkara perdata. Dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemulihan hak dilakukan dengan penyerahan obyek sengketa tanpa mengembalikan bangunan tersebut kepada bentuk semula seperti sebelum dieksekusi dan yang menanggung biaya pemulihan adalah pemohon pemulihan tersebut. Adapun mekanisme permohonan pemulihan sama dengan proses eksekusi yaitu memasukkan permohonan ke pengadilan dengan dasar adanya putusan peninjauan kembali. Dan pertimbangan pengadilan dalam hal terjadinya penundaan eksekusi karena adanya alasan peninjauan kembali sangatlah subjektif.
4. Skripsi Ramli Rizal, “Eksekusi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang”.⁹ Dalam skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang eksekusi perdata secara umum, Sedangkan dalam skripsi yang saya susun menitikberatkan tentang eksekusi riil dan mengkaji ruang lingkup eksekusi riil.

⁸Iin Fatimah, “Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata”, *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013).

⁹Ramli Hizal, “Eksekusi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang”, *Thesis* (Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2012).

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui ruang lingkup eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- b. Untuk mengetahui proses eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

2. Selanjutnya hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pengetahuan yang nantinya dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya, yang berhubungan dengan eksekusi.

- b. Kegunaan praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan khususnya dalam hukum acara perdata terutama yang berkaitan dengan eksekusi. Selain itu, diharapkan dari penelitian ini juga dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait mengenai masalah eksekusi.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Pengertian Eksekusi*

Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: *executie*, Inggris: *execution*) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan atau melakukan hukuman.¹

Pembahasan dari sudut pengertian eksekusi bertujuan memberi penjelasan mengenai istilah eksekusi kedalam bahasa Indonesia, agar tidak menjadi pemakaian yang keliru dan berlebihan. Menurut Subekti dan Retno Wulan Sutantio eksekusi diartikan sebagai: “Pelaksanaan” putusan.²

Menurut R. Subekti, eksekusi mengandung arti bahwa pihak yang kalah tidak mau menati putusan hakim secara sukarela sehingga putusan tersebut harus dipaksakan kepada pihak yang kalah dengan bantuan kekuatan umum.³

Menurut R. Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak yang berkepentingan menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi isi putusan dalam waktu yang ditentukan.⁴

Menurut Djazuli Bachar, melaksanakan putusan pengadilan memiliki tujuan yang tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi

¹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2005), h.184.

²M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.6.

³R. Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Binacipta, 1977), h. 133; dikutip dalam Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.193.

⁴Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.145.

yang dilakukan dengan secara paksa. Usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban yang merupakan eksekusi.⁵

Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan putusan pengadilan.⁶

Biasanya tindakan eksekusi baru merupakan masalah apabila pihak yang kalah adalah tergugat. Pada tahap eksekusi kedudukan tergugat berubah menjadi pihak “tereksekusi”.⁷

Berdasarkan uraian-uraian dari pendapat para ahli, maka dapat dijelaskan bahwa eksekusi adalah upaya paksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan bantuan kekuatan umum dari pengadilan karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.

B. Macam-Macam Eksekusi

Ada dua cara menjalankan isi putusan:⁸

1. Secara sukarela artinya pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan.
2. Eksekusi artinya tindakan paksa menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, eksekusi baru merupakan pilihan hukum

⁵Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum* (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995), h.6.

⁶Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, h.146.

⁷Umar Dani, *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN* (Yogyakarta: Genta Press, 2015), h.24.

⁸M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* (Jakarta: Sinar grafika, 2006), h.11.

apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara sukarela.

Jenis eksekusi dalam hukum acara perdata adalah:

1. *Parate executie* adalah eksekusi yang dilaksanakan tanpa membutuhkan titel eksekutorial dan pemegang gadai dapat melaksanakan secara langsung haknya (menjual) tanpa melalui perantara pengadilan. Eksekusi ini diatur pada pasal 1155, 1175 ayat 2 BW).⁹
2. Eksekusi melakukan suatu perbuatan berdasarkan Pasal 225 HIR, Pasal 259 Rbg.
3. Eksekusi riil. yaitu pelaksanaan putusan hakim secara langsung atau nyata. Eksekusi terakhir ini diatur pada Pasal 1033 Rv.¹⁰

C. *Pengertian Eksekusi Riil*

Eksekusi riil merupakan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan.¹¹ Misalnya, amar menghukum tergugat mengosongkan tanah terperkara, pelaksanaannya langsung secara nyata mengeluarkan tergugat dari tanah dan pada saat yang bersamaan menyerahkan penguasaan tanah yang dikosongkan kepada penggugat (pemohon eksekusi).

Dalam Pasal 200 ayat (11) HIR dan Pasal 218 ayat (2) Rbg hanya mengatur mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang, dimana jika pihak yang kalah tidak mau meninggalkan atau mengosongkan barang bergerak yang sudah dilelang. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan surat perintah kepada petugas eksekusi (Panitera

⁹Sri Soedewi Masjcheon Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan* (Yogyakarta: Liberty, 1980), h.32.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.23.

¹¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.23.

atau Jurusita) kalau perlu dengan bantuan polisi untuk mengosongkan barang tidak bergerak yang dilelang tersebut. Eksekusi riil tidak diatur secara terinci dalam undang-undang. Salah satu alasan kenapa tidak diatur secara terinci, karena eksekusi riil mudah dan sederhana. Tidak ada satupun dalam *HIR* atau *Rbg* yang khusus membicarakan eksekusi riil.¹²

Pasal 1033 *Rv* memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai eksekusi riil, berbunyi:

Apabila putusan pengadilan yang memerintahkan pengosongan barang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara barang tidak bergerak itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

D. Sumber Hukum Eksekusi

1. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang diatur di dalam *Herzien Indonesis Reglement (HIR)* yang berlaku khusus untuk daerah Jawa dan Madura. Sedangkan hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura diatur dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)*. Di dalam *HIR* diatur tentang eksekusi putusan pengadilan pada bagian kelima (Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 *HIR*) sedangkan dalam *Rbg* diatur pada bagian keempat (Pasal 206 sampai dengan Pasal 225).

¹²Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.172.

Dalam Undang-Undang Darurat No.1 tahun 1951 tidak terdapat perkecualian terhadap berlakunya hukum acara perdata sehingga berlakulah penuh kedua aturan tersebut.¹³

2. Peraturan Lain yang Berhubungan

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita dipimpin oleh ketua pengadilan.”

Selain itu Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa “Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan”.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum menegaskan bahwa dalam perkara perdata, maka Panitera Pengadilan Negeri bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Bahwa Pasal 60 Undang-Undang No. 60 tahun 1986 tetap berlaku karena tidak dirubah oleh Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 tahun 1964 dan Nomor 4 tahun 1975 tentang *gizeling* (sandera) sebagaimana diatur dalam Pasal 209-223 HIR/242-258 Rbg tidak dibenarkan lagi untuk dilaksanakan karena dinilai bertentangan dengan perikemanusiaan. Kedua surat edaran Mahkamah agung tersebut dicabut dengan

¹³Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, h.12.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan (*lijfdwang*).¹⁴

Upaya hukum peninjauan kembali bisa diajukan untuk membatalkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas dasar alasan yang sebagaimana diatur pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, berbunyi:

Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan alasan sebagai berikut:

- a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

E. Asas-Asas Eksekusi

1. Menjalankan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Pada prinsipnya, hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang dapat dilaksanakan.

Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jika terhadap putusan itu tidak lagi terbuka untuk menggunakan upaya hukum biasa yang tersedia. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding, atau

¹⁴Neng Yani Nurhayani, *Hukum Acara Perdata* (Cet. I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h.197.

kasasi, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Kecuali, terhadap upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali tidak menunda eksekusi.¹⁵

Selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, upaya eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pihak yang kalah tidak mau menaati putusan secara sukarela.

Putusan yang sudah tidak ada lagi upaya hukum (*Rachtsmiddel*), yaitu:

- a. Putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak diajukan banding;
- b. Putusan Mahkamah Agung (kasasi/PK);
- c. Putusan *verstek* yang tidak diajukan *verzet*.

Penggunaan upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali atau perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap eksekusi hanya menunjukkan bahwa putusan yang akan ditinjau dan dilawan pada umumnya benar-benar telah berkekuatan hukum pasti.¹⁶

Beberapa pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, antara lain:

- a. Pelaksanaan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) *HIR* atau Pasal 191 ayat (1) *Rbg*);
- b. Pelaksanaan putusan provisi (*provisionil*) (berdasarkan Pasal 180 ayat (1) *HIR* atau Pasal 191 ayat (1) *Rbg*, maupun Pasal 54 dan 55 *Rv*);

¹⁵Iin Fatimah, "Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2013), h.4.

¹⁶Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), h.22.

- c. Akta Perdamaian, (berdasarkan Pasal 130 *HIR* atau Pasal 154 *Rbg*);
- d. Eksekusi terhadap Grosee Akta, (berdasarkan Pasal 224 *HIR* atau Pasal 258 *Rbg*);
- e. Eksekusi Hak Tanggungan (HT) dan Jaminan Fidusia (JF), (berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)¹⁷

2. Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Sesuai ketentuan Pasal 196 *HIR* dan Pasal 207 *Rbg*, ada dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan yaitu dengan cara sukarela karena pihak yang kalah dengan sukarela melaksanakan putusan dan eksekusi dengan cara paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum.¹⁸

Apabila pihak yang kalah (termohon eksekusi) secara sukarela melaksanakan isi putusan pengadilan maka tindakan eksekusi tidak diperlukan lagi. Karena eksekusi dilakukan apabila pihak tereksekusi tidak melaksanakan atau menaati isi putusan pengadilan secara sukarela.

3. Putusan yang Dapat Dieksekusi Bersifat Kondemnator

Hanya putusan yang bersifat kondemnator yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman.

Sehubungan dengan prinsip ini, putusan ditinjau dari sifatnya dapat dibedakan atas:

¹⁷Iin Fatimah, “Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), h. 38.

¹⁸Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani, 1999), h.27.

a. Putusan yang bersifat deklarator

Pada putusan yang bersifat deklarator adalah putusan yang amar atau diktum putusan berisi pernyataan hukum atau penegasan tentang suatu hak atau kedudukan hukum. Misalnya, putusan yang menyatakan ikatan perkawinan sah. Putusan deklarator pada umumnya terdapat dalam perkara *voluntair*, yakni perkara yang berbentuk permohonan secara sepihak.

b. Putusan yang bersifat *constitutief*

Putusan *constitutief* atau konstitutif (*constitutief vonnis*) adalah putusan yang memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan perceraian.

c. Putusan yang bersifat kondemnator

Putusan yang bersifat *condemnatoir* atau kondemnator ialah putusan yang memuat amar menghukum terhadap pihak yang kalah dalam perkara. Amar putusan kondemnator merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan amar deklaratif, dan penempatan amar deklarator dalam putusan harus ditempatkan mendahului amar kondemnator. Pada umumnya putusan yang bersifat kondemnator terwujud dalam perkara yang berbentuk kontentiosa (*contentiosa*). Misalnya, sengketa wanprestasi. Amar putusan kondemnator berupa penjatuhan hukuman membayar ganti rugi kepada tergugat. Amar penjatuhan hukuman tersebut tidak dapat berdiri sendiri karena tidak mungkin menghukum tergugat membayar

ganti rugi tanpa lebih dulu ada amar deklaratif yang menyatakan tergugat melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada penggugat.¹⁹

Adapun ciri dan acuan untuk menentukan suatu putusan dianggap bersifat kondemnator, dalam amar atau diktum putusan terdapat perintah menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskan dalam kalimat:

- a. Menghukum atau memerintahkan menyerahkan suatu barang;
- b. Menghukum atau memerintahkan untuk mengosongkan;
- c. Menghukum atau memerintahkan melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghukum atau memerintahkan penghentian suatu perbuatan tertentu;
- e. Menghukum atau memerintahkan melakukan pembayaran sejumlah uang.²⁰

4. Eksekusi di Bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri

Menurut Pasal 195 Ayat (1) *HIR* dan Pasal 206 Ayat (1) *Rbg* yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan negeri tingkat pertama yang memutus dan memeriksa perkara yang diminta eksekusi tersebut. Eksekusi atas putusan tersebut berada dibawah pimpinan Ketua pengadilan Negeri yang bersangkutan. Secara *ex officio* (*amtshalve*) kewenangan eksekusi berada pada ketua pengadilan tingkat pertama (pengadilan agama/pengadilan negeri) yang bersangkutan dari sejak awal hingga akhir (dari *aanmaning* hingga penyerahan barang kepada penggugat). Pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan eksekusi, sekaligus terhadap putusannya sendiri. Pengadilan tinggi dan mahkamah agung hanya bertindak mengawasi jalannya eksekusi apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya. Sepanjang tidak ada penyimpangan pengadilan tinggi dan mahkamah agung tidak berwenang mencampurinya.²¹

¹⁹M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 876-877.

²⁰M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.16.

²¹Asdian Taluke, "Eksekusi Terhadap Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Ingkraah*) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri", *Lex Privatum*, Vol.I no. 4 (oktober 2013), h. 25. <http://id.portalgaruda.org> (Diakses 28 Desember 2015).

Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin eksekusi merupakan kewenangan formal secara *ex officio*. Kewenangan secara *ex officio* diatur dalam pasal 197 ayat (1) *HIR* atau Pasal 208 *Rbg* dan Pasal 195 Ayat (1) *HIR* atau Pasal 206 *Rbg*. Dengan mengaitkan pasal-pasal tersebut, gambaran kontruksi hukum kewenangan menjalankan eksekusi dengan singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan dan memimpin jalannya eksekusi;
- b. Kewenangan memerintahkan dan memimpin eksekusi yang ada pada Ketua Pengadilan Negeri adalah secara *ex officio*;
- c. Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri berbentuk surat penetapan (*beschikking*)
- d. Yang diperintahkan menjalankan eksekusi ialah panitera atau jurusita pengadilan negeri.²²

F. Ruang Lingkup Eksekusi Riil

Ruang lingkup eksekusi riil dilihat dari objek utang atau prestasi²³:

1. Menyerahkan benda, artinya menyerahkan benda yang diperkarakan kepada penggugat. Barang atau uang tersebut diserahkan secara langsung kepada penggugat.
2. Melakukan suatu perbuatan adalah perbuatan nyata dari tergugat secara langsung melaksanakan perbuatan itu.

²²M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 21.

²³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Lyberti Yogyakarta, 2009), h. 250.

3. Tidak melakukan suatu perbuatan, Eksekusi ini merupakan penghukuman penghentian sesuatu perbuatan yang dihukumkan kepada tergugat. Penghentian perbuatan yang dihukumkan harus dihentikan secara langsung dan nyata oleh pihak tergugat. Misalnya tergugat dihukum untuk menghentikan penggalian atas tanah terperkara. Berarti tergugat secara langsung dan nyata harus berhenti melakukan penggalian di atas tanah tersebut.

Ada pendapat yang mengatakan pembayaran sejumlah uang tidak termasuk eksekusi riil. Sebagaimana dikemukakan oleh Djazuli Bachrar bahwa:

Eksekusi riil sebenarnya mencakup eksekusi langsung terhadap penyerahan berupa barang atau suatu prestasi tanpa melalui pelelangan dan yang lain berupa pembayaran sejumlah uang (*verhaalsexectie*), seperti perintah membuat sebuah lukisan atau menyelesaikan lukisan akan sulit dilaksanakan tanpa ditentukan perbuatan penggantinya.²⁴

Namun, Sudikno Mertokusumo memasukkan pembayaran sejumlah uang dalam ruang lingkup eksekusi riil. Karena menurut Sudikno Mertokusumo eksekusi riil tidak hanya penerapan langsung, tetapi juga paksaan tidak langsung terhadap debitur agar memenuhi pelaksanaan putusan, sepanjang hal yang dituju tercapai. Putusan hakim tersebut sudah termasuk paksaan tidak langsung agar debitur memenuhi isi putusan.

Dari dua pendapat yang berbeda di atas. Penyusun berpendapat bahwa yang masuk ruang lingkup eksekusi riil adalah menyerahkan benda, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi, penyerahan benda yang dimaksud penyusun adalah penyerahan benda tidak bergerak seperti tanah. Namun,

²⁴Djazuli Bachar, *Eksekusi Putusan Perkara Perdata Segi Hukum dan Penegakan Hukum*, h.24.

apabila penyerahan benda bergerak atau sejumlah uang itu tidak termasuk dalam ruang lingkup eksekusi riil karena harus melalui proses pelelangan terlebih dahulu.

G. Proses Eksekusi Riil

Menjalankan eksekusi riil adalah merupakan tindakan nyata yang dilakukan secara langsung guna melaksanakan apa yang telah dihukumkan dalam amar putusan. Adapun tata cara menjalankan eksekusi riil sebagai berikut:

1. Pihak yang Kalah (Tergugat) Tidak Mau Menaati dan Memenuhi Putusan Secara Sukarela

Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.

2. Permohonan dari Pihak yang Menang

Jika pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara tersebut untuk melakukan eksekusi secara paksa.

Permohonan pengajuan eksekusi kepada ketua pengadilan merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh pihak yang menang agar putusan tersebut dapat dijalankan secara paksa, hal tersebut diatur dalam Pasal 207 ayat (1) *Rbg* dan Pasal 196 *HIR*.²⁵

Pasal 196 *HIR* berbunyi:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi keputusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya keputusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu

²⁵ Abdul Manan, *Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata*, h.29.

akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari. (Rv. 439, 443; IR. 94, 113, 130.)

3. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Eksekusi

Apabila ada pihak ketiga yang ingin mengajukan perlawanan terhadap objek eksekusi. Pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan.

Pasal 195 (6) *HIR* yang berbunyi:

Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1997 No.697 K/Sip/1974, menegaskan bahwa pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan²⁶.

Perlawanan ini juga tidak hanya dapat dilakukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat dilakukan atas dasar hak-hak lainnya, seperti hak pakai, HGB, HGU, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain.²⁷

Dalil *derden verzet* (perlawanan pihak ke tiga) yang disebut dalam Pasal 195 ayat (6) *HIR* dapat diperluas dengan alasan lain, antara lain:

- a. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi dijaminan kepada pelawan; atau
- b. Berdasarkan dalil barang yang hendak dieksekusi sedang berada di bawah sita jaminan atau sita eksekusi.²⁸

²⁶M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 314.

²⁷Ahmad Shalihin, "Hak Untuk Mengajukan Upaya Hukum", *Situs Resmi Pengadilan Negeri Manado*. <http://pn-manado.go.id/layanan-informasi/hak-untuk-mengajukan-upaya-hukum.html> (19 januari 2016).

Selain itu, dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/PN.Slmn. Alasan dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Adanya kepentingan dari pihak ketiga
2. Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan

Perlawanan pihak ketiga ini adalah upaya hukum luar biasa dan pada dasarnya tidak menunda eksekusi. Namun apabila perlawanan tersebut diyakini benar dan beralasan, maka eksekusi ditunda setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh pengadilan negeri.

Ada dua kategori yang dapat dipegang untuk menghadapi permohonan penundaan eksekusi atas alasan *derden verzet*:

- a. Pertama, kalau pelawan dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi bisa ditunda;
- b. Kedua, kalau pelawan tidak dapat membuktikan dalil perlawanan, eksekusi dijalankan terus sesuai dengan prinsip, *derden verzet* tidak secara mutlak menolak eksekusi.²⁹

4. Peringatan (*aanmaning*)

Pasal 196 HIR atau Pasal 107 Rbg menegaskan bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan panggilan terhadap pihak yang tereksekusi untuk menghadap di pengadilan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan untuk diberi peringatan.

Peringatan atau *aanmaning* merupakan salah satu syarat pokok eksekusi. Tanpa peringatan lebih dulu, eksekusi tidak boleh dijalankan.³⁰ *Aanmaning* dalam

²⁸M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 315.

²⁹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 317.

kaitannya menjalankan putusan merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada pihak yang kalah agar menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh ketua pengadilan negeri. Jangka waktu peringatan (*aanmaning*) paling lama 8 (delapan hari) atau boleh kurang delapan hari, tergantung penilaian dan pertimbangan ketua pengadilan. Dalam pemanggilan tersebut terdapat kemungkinan pihak yang kalah tidak hadir dengan alasan yang patut, maka keridakhadirannya dianggap belum sah, dan mesti ditolerir sehingga harus dipanggil ulang.

Jika sebaliknya, ketidakhadirannya tanpa alasan yang patut dan beralasan terhadap orang yang seperti ini, berlaku prinsip hukum tidak perlu melindungi orang yang membelakangi ketentuan. Menurut pasal 197 ayat (1) *HIR* atau Pasal 208 *Rbg* termohon eksekusi yang tidak mau memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut tersebut, terhadapnya:

- a. Tidak diperlukan proses pemeriksaan sidang peringatan;
- b. Tidak diberikan tenggang masa peringatan;
- c. Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan penetapan eksekusi dalam eksekusi riil atau penetapan *executoriale beslag* (sita eksekusi) dalam eksekusi pembayaran uang.³¹

Namun apabila panggilannya itu dipenuhi oleh pihak yang kalah, pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan, maka dilakukan sidang peringatan yang dihadiri oleh panitera, ketua pengadilan dan tergugat.³² Dalam sidang tersebut pihak yang kalah diperingatkan untuk menjalankan isi putusan yang dihukumkan

³⁰M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 30.

³¹M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h. 34.

³²Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 30.

kepadanya serta diberitahukan batas waktu pelaksanaan putusan, paling lama diberikan waktu 8 hari .

Semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan pemberian peringatan, dicatat dalam berita acara sebagai bukti autentik sidang peringatan. Bahkan berita acara tersebut sangat penting untuk mendukung dan menjadi sumber landasan keabsahan penetapan perintah eksekusi selanjutnya.³³

5. Penetapan Perintah Eksekusi

Apabila masa peringatan telah dilampaui dan pihak yang kalah tetap tidak memenuhi isi putusan maka sejak saat itu Ketua Pengadilan Negeri dapat langsung mengeluarkan penetapan yang berisi perintah kepada juru sita atau panitera untuk melaksanakan eksekusi sesuai dengan isi dari amar putusan.

H. Tinjauan Eksekusi Menurut Hukum Islam

Sebagai manusia, memiliki cinta akan sesuatu adalah hal yang lumrah. Rasa cinta itu pun muncul karena merupakan rahmat dari Allah. Rasa cinta inilah yang menjadikan makhluk yang lemah. Kecintaan manusia terhadap kehidupan dunia yang berlebih akan menjadikan manusia tamak. Salah satu bentuk cinta yang membuat manusia menjadi tamak adalah cinta kepada harta.

Mengambil hak dengan cara merampas bisa saja dihalalkan bagi manusia yang haus akan belaian dunia. Maka dari itu, peran andil pengadilan sebagai garda terdepan pucuk keadilan di dunia adalah penting adanya. Hak milik siapa dan untuk siapa membawa masyarakat yang satu dengan yang lainnya saling berselisih paham. Maka dari itu, melalui putusan hakim diperlukan keadilan, kemanfaatan dan

³³M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, h.33.

kepastian hukum bagi masyarakat. Diperlukan tindakan nyata dan langsung melaksanakan apa yang dihukumkan dalam amar putusan atau yang disebut eksekusi.

Di dalam al-Qur'an dan Hadits tidak ada nash yang melarang ataupun yang memerintahkan eksekusi riil secara eksplisit. Karena itu, hukum eksekusi riil harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (*qaidah fiqhiyah*) yang menyatakan:

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ وَالْأَفْعَالِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³⁴

Selain itu beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan indikasi bahwa pada dasarnya Islam membolehkan eksekusi. Eksekusi itu bisa berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya:

“Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan.”³⁵

³⁴Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, h.56; dikutip dalam Mukhamad Makhrus, “Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), h.45.

³⁵Muhlish usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah; Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*, h.145; dikutip dalam Mukhamad Makhrus, “Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana”, *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), h.45.

Islam itu adalah agama yang membawa rahmat dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan kebaikan sebagai perwujudan dari akhlak yang baik dan sebaliknya Islam melarang umatnya untuk melakukan segala hal yang berkaitan dengan keburukan dan kemudharatan. Larangan yang diperintahkan untuk ditinggalkan tersebut salah satunya adalah mengambil atau menguasai sesuatu yang bukan miliknya yang dapat berupa tanah kebun, tanah pertanian, rumah dan sebagainya.

Larangan yang dimaksudkan di atas telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya Q.S al-Nisā'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”³⁶

Ayat di atas melarang kaum muslimin untuk mengambil harta orang lain dengan cara yang batil karena harta yang haram menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang mengambil dengan orang yang hartanya diambil.

³⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h.83.

Ayat di atas juga mengingatkan bahwa umat saling bahu membahu di dalam menjamin hak –hak dan maslahat-maslahat.³⁷

As-Sa'ib ibn Yaziz dari ayahnya menerangkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ، جَدًّا أَخِيهِ فَالْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ وَلَا لَاعِبًا، وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ عَصَا

Artinya:

“Janganlah salah seorang kamu mengambil harta benda saudaranya. Baik dengan maksud memiliki atau hanya sekedar main-main. Apabila kamu mengambil tongkat saudaranya, hendaklah tongkat tersebut dikembalikannya.”³⁸

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ظَلَمَ شَبْرًا مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

“Barangsiapa secara zalim menyerobot sejengkal tanah kebun milik orang, niscaya pada hari kiamat lehernya akan dililit dengan tujuh tanah.”³⁹

Barangsiapa yang menanam di tanah rampasan, maka tanaman itu milik yang punya tanah, dan bagi perampas dan pohon yang ditanam juga wajib dicabut, demikian juga bangunan yang dibuat juga harus dirobohkan, sebagaimana hadits

³⁷Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5 dan 6* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), h.25.

³⁸Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 3* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), h. 431.

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum 3*, h. 432-433.

Raafi' bin Khudaij disebutkan bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بَغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ،
وَلَهُ نَفَقَتُهُ

Artinya:

“Barangsiapa yang menanam sesuatu di tanah orang lain tanpa seizin pemiliknya, tidak ada sesuatu yang ditanam itu menjadi miliknya, namun dia akan memperoleh rugi.”⁴⁰

Syaikh Shalih Al Fauzan dalam *al-Malkhash Fiqhiy* berkata:

“Jika orang yang melakukan *ghasb* (rampasan) telah membuat bangunan di tanah rampasannya atau menanam di atasnya tanaman, maka ia harus melepas bangunan itu atau mencabut tanaman itu, jika pemiliknya meminta demikian. Jika tindakannya itu sampai membekas ke tanah yang dirampasnya, maka ia wajib mengganti rugi kekurangannya, di samping ia juga harus menghilangkan sisa-sisa tanaman dan bangunan sehingga ia menyerahkan tanah kepada pemiliknya dalam keadaan baik. Ia pun wajib membayar upah standar dari sejak merampas sampai menyerahkannya, karena ia mencegah pemiliknya untuk memanfaatkan di masa itu dengan tanpa hak. Jika ia merampas sesuatu dan menahannya hingga menjadi murah harganya, maka harus menanggung kekurangannya menurut pendapat sahih.”⁴¹

Dari ayat dan hadist di atas dapat diketahui bahwa Islam melarang kaum muslimin untuk mengambil hak orang lain karena hal tersebut merupakan perbuatan dzalim. Mengambil, menguasai atau merampas barang milik orang lain apapun bentuknya dan sekecil apapun nilainya merupakan pelanggaran. Islam melarang seorang muslim untuk mengambil atau menguasai harta milik sesama muslim lainnya kecuali atas persetujuan pemiliknya.

⁴⁰Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Koleksi Hadits-hadits Hukum* 3, h. 435.

⁴¹Marwan bin Musa, “Hukum Mengambil Dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim (bag.1)”, *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*, 1 Januari 2013. <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html> (20 April 2016).

Setiap orang yang mengambil hak orang lain diharuskan untuk mengembalikannya.

Eksekusi riil dapat menjadi salah satu upaya paksa untuk mengembalikan hak dari orang yang didzalimi apabila orang yang merampas tanah (orang yang dzalim) tidak mau mengembalikan barang yang telah dirampas atau dikuasai. Eksekusi riil menjamin hak dari pemilik barang yang dikuasai.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan penelitian empiris (*empirical research*) yang dilaksanakan untuk menyesuaikan teori dan praktik dengan melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2 (dua) jurusita dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri Sunguminasa mengumpulkan data tentang eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, maka lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

B. *Pendekatan Penelitian*

Metode pendekatan yang penyusun pakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis yaitu dengan mengkaji penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksekusi riil dan pendekatan hukum empiris berarti praktik eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

C. *Sumber Data*

Dalam penyusunan skripsi ini, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, data yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang

terkait mengenai ruang lingkup eksekusi riil, proses eksekusi riil, dan faktor yang mempengaruhi eksekusi riil yang penyusun teliti dengan melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2 (dua) jurusita dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian berupa buku-buku, literatur-literatur, laporan hasil penelitian yang berkaitan, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan eksekusi riil dalam perkara perdata yang penyusun teliti.
 - a. Bahan hukum primer berupa *HIR (Herziene endonesis reklement)*, *Rbg (recht buitengewesten)*, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum, hasil-hasil penelitian, internet, buku.
 - c. Bahan hukum tersier kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian. Metode observasi ini, digunakan untuk mengumpulkan data tentang eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sunguminasa.

2. Wawancara, yaitu melakukan wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu kepada informan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan untuk mencapai maksud yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penyusun melakukan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini sebanyak 3 (tiga) narasumber yang terdiri atas 2 (dua) jurusita dan 1 (satu) panitera pengganti di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang dipakai untuk memperoleh data-data untuk melengkapi penyusunan skripsi ini dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penyusun menggunakan *handphone* untuk merekam proses wawancara dengan narasumber yang terkait dengan skripsi ini dan menggunakan alat tulis untuk mencatat dokumen berupa buku register permohonan eksekusi perkara perdata, buku register gugatan perkara perdata yang diperoleh penyusun di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder yang diperoleh penyusun guna mendapatkan gambaran nyata tentang eksekusi riil dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Kemudian, dipaparkan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Pengadilan Negeri Sungguminasa

Pengadilan Negeri Sungguminasa merupakan pengadilan tingkat pertama yang memiliki wewenang untuk melakukan eksekusi putusan sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat kedua, dan Mahkamah Agung tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.

Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki Visi dan Misi, Yaitu:

a. Visi

Terwujudnya badan peradilan indonesia yang agung.

b. Misi

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

2. Yurisdiksi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:

- a. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;
- b. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum¹

Pengadilan Negeri Sungguminasa memiliki wilayah hukum di 1 (satu) Kabupaten Gowa yang meliputi 18 (delapan belas) Kecamatan, dengan luas wilayah 1.883,33 km² yang meliputi 167 (seratus enam puluh tujuh) desa/kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah secara umum, yaitu sebelah utara (Kota Makassar dan Kabupaten Maros), sebelah timur (Kabupaten Sinjai, Bone, Bulukumba, dan Bantaeng), sebelah selatan (Kabupaten Takalar dan Jeneponto), sebelah barat (Kota Makassar dan Kabupaten Takalar).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:



¹“Yurisdiksi”, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <http://kbbi.web.id/yurisdiksi> (03 Maret 2016).

Tabel 1
Batas Wilayah Hukum

No.	Kecamatan	Batas Wilayah			
		Sebelah Utara	Sebelah Timur	Sebelah Selatan	Sebelah Barat
1	Bontonompo	Kec. Bajeng	Kab. Takalar	Bontonompo Selatan	Kab. Takalar
2	Bontonompo Selatan	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar	Kab. Takalar	Kab. Takalar
3	Bajeng	Kec. Pallangga	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar
4	Bajeng Barat	Kec. Bajeng	Kec. Bajeng	Kec. Bontonompo	Kab. Takalar dan Bajeng Barat
5	Pallangga	Kec. Sombaopu	Kec. Bontomarannu	Kec. Bajeng	Kec. Barombong
6	Barombong	Kota Makassar	Kec. Bajeng dan Pallangga	Kec. Bajeng	Kota Makassar
7	Somba Opu	Kota Makassar	Kec. Bontomarannu	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Pallangga dan Kota Makassar
8	Bontomarannu	Kec. Pattalassang	Kec. Parangloe	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar	Kec. Sombaopu
9	Pattalassang	Kab. Maros dan	Kec. Parangloe	Kec. Bontomarannu	Kec. Sombaopu dan Kec. Pallangga
10	Parangloe	Kab. Maros	Kec. Tinggimoncong	Kec. Manuju	Kec. Bontomarannu dan Kab. Takalar

11	Manuju	Kec. Parangloe	Kec. Bungaya	Kec. Bungaya	Kec. Pallangga dan Kab. Takalar
12	Tinggimoncong	Kab. Maros dan Kec. Tombolo Pao	Kab. Bulukumba dan Kec. Tombolo Pao	Kec. Bontolempangan dan Kab. Bantaeng	Kec. Parangloe dan Kec. Manuju
13	Tombolo Pao	Kab. Bone	Kab. Sinjai	Kab. Bululumba	Kec. Tinggimoncong
14	Parigi	Kec. Tinggimoncong	Kab. Bululumba	Kec. Bungaya	Kec. Parangloe
15	Bungaya	Kec. Parangloe	Kec. Bontolempangan	Kec. Tompobulu	Kab. Takalar
16	Bontolempangan	Kec. Parangloe dan Kec. Tinggimoncong	Kec. Tinggimoncong	Kec. Tompobulu	Kec. Bungaya
17	Tompobulu	Kec. Bontolempangan	Kab. Bantaeng dan Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto	Kab. Jeneponto dan
18	Biringbulu	Kec. Bungaya	Kec. Tompobulu	Kab. Jeneponto	Kab. Takalar

Sumber: <http://pn-sungguminasa.go.id>, diakses tanggal 22 Februari 2016.

Perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak lebih dari 100 perkara setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat jumlah perkara perdata yang terdaftar, putus dan berkekuatan hukum tetap pada tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tabel dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah Perkara Perdata yang Masuk, dan Putus Tahun 2011-2015 di
Pengadilan Negeri Sungguminasa

No.	Tahun Perkara	Masuk	Putus
1.	2011	43 perkara	27 perkara
2.	2012	47 perkara	40 perkara
3.	2013	64 perkara	48 perkara
4.	2014	44 perkara	54 perkara
5.	2015	57 perkara	57 perkara
Jumlah		225 perkara	226 perkara

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016

Pada tabel 2 di atas, diketahui bahwa jumlah perkara perdata yang masuk, dan putus dari tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu: 225 perkara masuk, dan 226 perkara putus. Secara berurut dijelaskan jumlah perkara yang paling banyak masuk sampai paling sedikit yaitu pada tahun 2013 sebanyak 64 perkara, tahun 2015 sebanyak 57 perkara, tahun 2012 sebanyak 47 perkara, tahun 2014 sebanyak 44 perkara, dan paling sedikit pada tahun 2011 sebanyak 43 perkara.

Jumlah perkara yang putus dari tahun 2011-2015 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkara yang putus tahun 2011 sebanyak 27, tahun 2012 sebanyak 40

perkara, tahun 2013 sebanyak 48 perkara, tahun 2014 sebanyak 54 perkara , dan paling tinggi tahun 2015 sebanyak 57 perkara.

Banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Sungguminasa dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat yang ingin menyelesaikan perkaranya melalui pengadilan.

B. Ruang Lingkup Eksekusi Riil

Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara guna melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang diatur dalam Pasal 195-224 *HIR (Herzien Indonesi Reglement)*. Hanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi. Jurusita melakukan eksekusi sesuai isi amar putusan yang dimohonkan eksekusi. Dalam penelitian ini penyusun mengambil sampel permohonan eksekusi riil yang terdaftar pada tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nyerang, Jurusita pengadilan Negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:

Selama saya jadi jurusita belum pernah saya menemukan permohonan eksekusi melakukan sesuatu perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan. Namun, apabila ada permohonan seperti itu. Kami akan melaksanakan eksekusi tersebut.²

Demikian hal dikemukakan oleh Bapak Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa bahwa:

Belum pernah ada permohonan eksekusi melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Selama ini eksekusi benda tidak bergerak seperti tanah. Kalau benda bergerak seperti mobil pernah tapi jaminan utang, bukan eksekusi riil tapi pembayaran sejumlah uang karena ujung-ujungnya berakhir dengan pelelangan.³

² Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 04 April 2016.

³ Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 04 April 2016.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2011-2015 belum pernah ada eksekusi riil melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Permohonan eksekusi riil yang pernah ada hanya eksekusi berupa penyerahan benda tidak bergerak. Permohonan eksekusi penyerahan benda bergerak seperti mobil memang pernah terjadi di Pengadilan Negeri Sungguminasa. Tetapi eksekusi tersebut tidak termasuk eksekusi riil.

Permohonan eksekusi riil yang masuk di pengadilan negeri sungguminasa dari tahun 2011 tahun 2015 yang ada adalah penyerahan benda tidak bergerak dalam bentuk pembongkaran dan pengosongan.

Adapun Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa sebanyak 63 permohonan yang terdiri eksekusi penyerahan benda tidak bergerak dalam bentuk pembongkaran dan pengosongan. Untuk mendapatkan gambaran mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Jumlah Permohonan Eksekusi Riil Tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa

No.	Tahun	Permohonan Eksekusi
1.	2011	21 permohonan
2.	2012	10 permohonan
3.	2013	9 permohonan
4.	2014	12 permohonan
5.	2015	11 permohonan
Jumlah		63 permohonan

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap belum tentu mengajukan eksekusi pada tahun yang sama karena pengajuan eksekusi tidak memiliki batas waktu.

Berdasarkan tabel 3 di atas, diketahui masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Banyaknya permohonan eksekusi yang masuk ke Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan ketaatan hukum masyarakat masih rendah karena tidak mau melaksanakan putusan hakim secara sukarela. Tanpa melalui upaya paksa eksekusi.

Padahal putusan hakim yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap harus segera dilaksanakan agar terciptanya kepastian hukum dan tegaknya keadilan. Selain itu, eksekusi memerlukan biaya yang tidak sedikit dan waktu untuk mendapatkan kepastian hukum lebih lama.

Adapun data mengenai eksekusi yang terlaksana, belum terlaksana, dan damai dari tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4
Perbandingan Eksekusi yang Terlaksana, Belum Terlaksana, dan Damai
Tahun 2011-2015

No.	Tahun	Terlaksana	Belum Terlaksana	Damai
1.	2011	8 perkara	8 perkara	5 perkara
2.	2012	2 perkara	8 perkara	-
3.	2013	1 perkara	6 perkara	2 perkara
4.	2014	3 berkas	9 perkara	-
5.	2015	2 berkas	9 berkas	-
Jumlah		16 berkas	40 berkas	7 perkara

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016.

Memperhatikan tabel 4 di atas, pada tahun 2011-2015 terdapat 16 perkara yang terlaksana, 40 perkara yang belum terlaksana, dan 7 perkara yang damai. Eksekusi yang damai artinya pihak termohon eksekusi pada akhirnya menyerahkan objek eksekusi tanpa melalui proses eksekusi.

Jumlah berkas eksekusi yang belum terlaksana lebih banyak dibandingkan dengan jumlah berkas yang terlaksana. Hal ini menandakan dalam proses eksekusi memiliki banyak hambatan. Sehingga eksekusi tidak terlaksana.

Untuk gambaran lebih jelas mengenai persentase eksekusi yang terlaksana, belum terlaksana dan damai yang terdaftar pada tahun 2011-2015 di Pengadilan Negeri Sungguminasa dapat dilihat pada tabel 5 dibawah ini:

Tabel 5
Perbandingan Persentase Eksekusi terlaksana, Belum Terlaksana dan Damai

No.	Tahun	Terlaksana	Belum Terlaksana	Damai
1.	2011	38%	38%	24%
2.	2012	20%	80%	-
3.	2013	11%	67%	22%
4.	2014	25%	75%	-
5.	2015	18%	82%	-

Sumber: Data diolah dari tabel 4.

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa perbandingan persentase eksekusi terlaksana, belum terlaksana dan damai, yaitu; pada tahun 2011 terlaksana 38%: belum terlaksana 38% : damai 34%, tahun 2012 terlaksana 20% : belum terlaksana 80% : damai 0%, tahun 2013 terlaksana 11% : belum terlaksana 67% : damai 22%, tahun 2014 terlaksana 25% : belum terlaksana 75% : damai 0%, tahun 2015 terlaksana 18% : belum terlaksana 82% : damai 0%.

Pada tahun 2011 eksekusi yang belum terlaksana dan yang terlaksana memiliki persentase yang sama yaitu 38%. Selain tahun 2011, persentase eksekusi belum terlaksana lebih tinggi apabila dibandingkan dengan persentase eksekusi yang terlaksana dan damai. Tingginya persentase eksekusi yang belum terlaksana eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa menunjukkan bahwa karakter masyarakat yang tetap bersikeras tidak mau melaksanakan putusan hakim meskipun telah melalui upaya

paksa eksekusi. Tingginya persentase eksekusi yang belum terlaksana tentunya terkait dengan banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan eksekusi.

C. Proses Eksekusi Riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa

1. Permohonan Eksekusi

Pemohon Eksekusi membuat permohonan eksekusi yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan (Pasal 196 *HIR* atau Pasal 207 ayat (1) *Rbg*) dengan melampirkan salinan putusan berkekuatan hukum tetap yang dimintakan eksekusi. Ketua Pengadilan mempelajari permohonan yang diajukan pemohon eksekusi. Setelah berkas diperiksa, berkas diserahkan ke bagian Paniteramuda Perdata dan didisposisi ke bagian eksekusi. Berkas tersebut diteliti kelengkapan permohonan eksekusi. Setelah berkas sudah rampung, pemohon eksekusi disuruh menghadap ke Pengadilan Negeri untuk membayar biaya *aanmaning* (peneguran) yang mana pemohon eksekusi menyetor ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI). Penyetoran biaya ke BRI ini adalah bagian dari upaya untuk memujudkan transparansi dan akuntabilitas, yang sebelumnya pembayaran dilakukan dikasir yang ada dibagian Kepaniteraan Perdata.

Setelah pemohon Eksekusi membayar, pemohon eksekusi menyerahkan bukti penyetoran kepada kasir yang berada di bagian Kepaniteraan Perdata dan kasir mengeluarkan tanda bukti pembayaran berupa SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar).

Bagian eksekusi menyerahkan berkas *aanmaning* yang sudah lengkap kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat *aanmaning* serta memberikan perintah kepada jurusita pengganti agar memanggil termohon eksekusi untuk hadir dalam sidang *aanmaning* tersebut.

Jurusita pengganti melakukan pemanggilan kepada para pihak paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal *aanmaning* yang telah ditetapkan.

Besarnya biaya *aanmaning* diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 02/KPN/SK/HPDT/VIII/2014. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5
Biaya Peneguran Eksekusi

No.	Biaya
1.	Redaksi Rp. 5.000
2.	Materai Rp. 12.000
3.	Proses Rp. 100.000
4.	Panggilan 3x Rp. Sesuai Radius

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 22 Februari 2016.

Berdasarkan tabel 5 di atas, biaya *aanmaning* terdiri atas biaya redaksi sebesar Rp. 5.000, biaya materai sebesar Rp. 12.000, biaya proses sebesar Rp. 100.000, dan biaya panggilan sesuai radius. Biaya panggilan sesuai radius artinya biaya panggilan disesuaikan dengan tempat tinggal dari termohon eksekusi.

Biaya pemanggilan termohon eksekusi paling sedikit pada daerah Somba Opu yaitu Rp. 85.000, Pallangga dan Barombong Rp. 100.000, Bajeng dan Bajeng Barat Rp. 115.000, Bontonompo, Bontomarannu, Pattalassang, Bontonompo Selatan Rp.125.000, Parangloe Rp. 150.000, Manuju Rp. 200.000, Tinggimoncong, Bungaya, Parigi Rp. 225.000, Tombolo Pao, Tompobulu, Biringbulu, Bonto Lempangan Rp.250.000. Biaya pemanggilan ini sesuai dengan jarak dari setiap daerah dari Pengadilan Negeri Sungguminasa. Semakin jauh wilayahnya maka semakin mahal pula biayanya, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6
Biaya Transportasi Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri
Sungguminasa Kab. Gowa

No.	Nama Kecamatan	Transportasi
1.	Somba opu	Rp. 85.000
2.	Pallangga	Rp. 100.000
3.	Barombong	Rp. 100.000
4.	Bajeng	Rp. 115.000
5.	Bajeng barat	Rp. 115.000
6.	Bontonompo	Rp. 125.000
7.	Bontomarannu	Rp. 125.000
8.	Pattalassang	Rp. 125.000
9.	Bontonompo Selatan	Rp. 125.000
10.	Parangloe	Rp. 150.000
11.	Manuju	Rp. 200.000
12.	Tinggimoncong	Rp. 225.000
13.	Tombolo Pao	Rp. 250.000
14.	Tompo Bulu	Rp. 250.000
15.	Biring Bulu	Rp. 250.000
16.	Bungaya	Rp. 225.000
17.	Bonto Lempangan	Rp. 250.000
18.	Parigi	Rp. 225.000

Sumber: Kantor Pengadilan Negeri Sungguminasa Tahun 2016.

Kalkulasi biaya peneguran dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Biaya Peneguran

No.	Nama Kecamatan	Biaya		Total
		Administrasi	Transportasi	
1.	Somba opu	Rp. 117.000	Rp. 255.000	Rp. 372.000
2.	Pallangga	Rp. 117.000	Rp. 300.000	Rp. 417.000
3.	Barombong	Rp. 117.000	Rp. 300.000	Rp. 417.000
4.	Bajeng	Rp. 117.000	Rp.345.000	Rp. 462.000
5.	Bajeng barat	Rp. 117.000	Rp. 345.000	Rp. 462.000
6.	Bontonompo	Rp. 117.000	Rp. 375.000	Rp. 492.000
7.	Bontomarannu	Rp. 117.000	Rp. 375.000	Rp. 492.000
8.	Pattalassang	Rp. 117.000	Rp. 375.000	Rp. 492.000
9.	Bontonompo Selatan	Rp. 117.000	Rp. 375.000	Rp. 492.000
10.	Parangloe	Rp. 117.000	Rp. 450.000	Rp. 567.000
11.	Manuju	Rp. 117.000	Rp. 600.000	Rp. 717.000
12.	Tinggimoncong	Rp. 117.000	Rp. 675.000	Rp. 792.000
13.	Tombolo Pao	Rp. 117.000	Rp. 750.000	Rp. 867.000
14.	Tompo Bulu	Rp. 117.000	Rp. 750.000	Rp. 867.000
15.	Biring Bulu	Rp. 117.000	Rp. 750.000	Rp. 867.000
16.	Bungaya	Rp. 117.000	Rp. 675.000	Rp. 792.000
17.	Bonto Lempangan	Rp. 117.000	Rp. 750.000	Rp. 867.000
18.	Parigi	Rp. 117.000	Rp. 675.000	Rp. 792.000

Sumber: Data diolah dari tabel 5 dan tabel 6.

Berdasarkan tabel 7 di atas, menunjukkan bahwa kalkulasi biaya peneguran di Pengadilan Negeri Sungguminasa berkisar antara Rp. 372.000-Rp. 867.000. Daerah

somba opu yaitu Rp. 202.000, Pallangga dan Barombong Rp. 417.000, Bajeng dan Bajeng Barat Rp. 462.000, Bontonompo, Bontomarannu, Pattalassang, Bontonompo Selatan Rp. 492.000, Parangloe Rp. 567.000, Manuju Rp. 717.000, Tinggimoncong, Bungaya, Parigi Rp. 792.000, Tombolo Pao, Tompobulu, Biringbulu, Bonto Lempangan Rp. 867.000.

2. Aanmaning (Peneguran)

Termohon Eksekusi dipanggil untuk menghadap dimuka pengadilan pada hari dan tanggal yang tercantum pada relas panggilan *aanmaning* (peneguran).

Aanmaning (peneguran) dipimpin Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang didampingi Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Aanmaning dibuka oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, lalu pihak Termohon Eksekusi atau kuasanya dipersilahkan masuk kedalam ruangan yang disediakan untuk itu. Apabila termohon eksekusi tidak hadir pada saat itu, Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan bahwa *aanmaning* ditunda dan menetapkan tanggal *aanmaning* yang akan datang. Setelah penetapan penundaan *aanmaning* tersebut diucapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa dan memerintahkan jurusita untuk memanggil termohon eksekusi pada *aanmaning* yang akan datang, lalu ditutup.

Termohon Eksekusi dipanggil hingga 3 (tiga) kali secara patut untuk hadir pada *aanmaning* apabila ketidakhadirannya beralasan. Pada saat pemanggilan ke tiga kalinya Termohon Eksekusi tidak hadir juga, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan Termohon Eksekusi tidak akan dipanggil lagi karena sudah cukup dan memenuhi prosedur hukum. Ketika termohon eksekusi hadir pada hari *aanmaning*, maka Ketua Pengadilan memberikan waktu 8 (delapan) hari kepada

Termohon Eksekusi untuk melaksanakan putusan pengadilan, apabila termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan tersebut, maka sudah dapat dilaksanakan eksekusi.

Aanmaning dengan hadir atau tidak hadirnya Termohon Eksekusi dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa serta Panitera dan Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa.

Apabila ada perlawanan dari pihak termohon eksekusi dalam bentuk gugatan, ataupun perlawanan dari pihak ketiga. Maka, ketua pengadilan akan mempertimbangkan apakah eksekusi ditunda atau tidak.

3. Sita Eksekusi

Di Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebelum eksekusi riil dilaksanakan. Terlebih dahulu diletakkan sita eksekusi terhadap objek yang akan dieksekusi.

Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi, apabila Termohon Eksekusi tetap tidak memenuhi isi putusan setelah melampaui waktu *aanmaning* atau Termohon Eksekusi tidak hadir pada saat *aanmaning*. Penetapan Sita Eksekusi berisi perintah kepada jurusita untuk melakukan sita eksekusi terhadap objek eksekusi.

Dalam melaksanakan sita eksekusi, Jurusita harus datang ke lokasi objek eksekusi. Jurusita memberitahukan kepada orang yang telah ditunjuk oleh tersita/pihak tersita/termohon eksekusi untuk menjaga objek eksekusi dengan baik, tidak boleh dialihkan atau dipindah tangankan seperti dengan penjualan dan sebagainya. Sita eksekusi terhadap objek eksekusi diumumkan ditempat eksekusi sehingga diketahui oleh orang banyak dan turut mengawasinya.

Setelah itu, Jurusita membuat berita acara eksekusi yang ditanda tagani oleh Jurusita, saksi-saksi, serta Kepala Desa Setempat.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:

Dilakukan sita eksekusi supaya mereka itu mengerti tentang putusan mahkamah agung, atau putusan pengadilan tinggi, ataupun putusan pengadilan negeri. Supaya dia sadari dirinya bahwa ujung-ujungnya ini akan dieksekusi. Tapi biasa setelah sita eksekusi berhasil jalannya damai. Daripada dieksekusi nanti. Kalau damai tidak dilakukan eksekusi.⁴

Bapak Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa. Dari hasil wawancara beliau mengemukakan bahwa “Sita eksekusi dilakukan untuk memperjelas objek yang akan dieksekusi”.⁵

Dari wawancara yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa di Pengadilan Negeri Sungguminasa sita eksekusi tidak hanya dilakukan pada eksekusi pembayaran uang tetapi juga dilakukan pada eksekusi riil. Padahal seharusnya sita eksekusi tidak perlu diterapkan pada eksekusi riil karena hanya membuang waktu.

Menurut Yahya Harahap, salah satu yang membedakan eksekusi riil dengan eksekusi pembayaran uang ialah perbedaan penahanan proses. Pada eksekusi riil, ketua pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi. Dengan penetapan itu, jurusita dapat langsung menuntaskan eksekusi secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah dianggap selesai, tanpa tahap sita eksekusi. Lain halnya pada eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada eksekusi pembayaran sejumlah uang, harus melalui proses sita eksekusi atas harta kekayaan termohon eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan

⁴Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016.

⁵Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 7 Maret 2016.

lelang yang melibatkan jawatan lelang. Pada eksekusi pembayaran uang, sita eksekusi bertujuan sebagai penjamin uang yang mesti dibayarkan kepada pihak penggugat. Pembayaran sejumlah uang itu dapat dipenuhi dari hasil penjualan lelang barang yang disita eksekusi.⁶

4. Penetapan

Ketua pengadilan dalam penetapannya memerintahkan kepada Panitera/Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa atau jika berhalangan dapat ditunjuk penggantinya yang sah sebagaimana diatur pada Pasal 209 Rbg ayat 2 dengan disertai 2 (dua) orang saksi sebagaimana diatur pada Pasal 210 Rbg, dan jika perlu dengan bantuan alat keamanan negara untuk melakukan pemulihan eksekusi terhadap objek sengketa.

Jurusita dapat meminta bantuan kepada Polisi atau polisi Militer, dalam hal yang dihukum untuk melakukan pengosongan rumah itu misalnya, adalah seorang anggota ABRI.⁷ Dalam surat penetapan ketua pengadilan tersebut, harus jelas rincian ukuran, luas, dan batas-batas objek eksekusi.

Sebelum hari dan tanggal eksekusi, Jurusita Pengganti memberitahukan kepada pihak kepolisian untuk memberikan pengamanan, PLN (Perusahaan Listrik Negara) untuk mencabut listrik lokasi eksekusi, kepala kecamatan setempat, kepala lurah setempat, kepala desa setempat, Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk hadir pada hari dan tanggal eksekusi yang telah ditetapkan.

⁶Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.25.

⁷Retno Wulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 1997), h.136.

5. Eksekusi

Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari dan tanggal yang ditentukan langsung ke lokasi objek eksekusi untuk melaksanakan eksekusi atas objek eksekusi yang ada dalam penguasaan Termohon Eksekusi.

Jurusita yang melaksanakan eksekusi harus datang ke lokasi eksekusi, tidak dibenarkan mengeksekusi dengan cara jarak jauh.⁸

Jurusita disertai dengan pengamanan dan 2 (dua) orang saksi yang berwarga negara Indonesia, telah berumur minimal 21 tahun dan dapat dipercaya. Pelaksananya di pengadilan negeri sungguminasa, yang dijadikan saksi dari kalangan pegawai pengadilan negeri sungguminasa.

Jurusita membacakan amar putusan yang berkekuatan hukum tetap di lokasi eksekusi dan melaksanakan eksekusi sesuai amar putusan.

Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa mengemukakan bahwa:

Saat eksekusi termohon eksekusi dan keluarganya meninggalkan objek sengketa beserta harta bendanya dan menyerahkan objek sengketa dalam keadaan utuh, kosong, dan sempurna kepada pihak pemohon eksekusi dan apabila eksekusi berupa pembongkaran, semua bangunan yang ada di atas tanah tersebut diratakan dengan tanah sesuai isi putusan. Bahkan kalau ada pohon diatasnya kita tebang. Kadang ketika eksekusi dilaksanakan, termohon eksekusi tidak hadir. Jadi barangnya kami titipkan kepada pemerintah setempat.⁹

⁸Abdul Manan, "Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata", *Mimbar hukum dan Peradilan*, no.70 (2010), h. 31.

⁹Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa eksekusi dikatakan selesai apabila isi putusan sudah terlaksana. Termohon eksekusi harus mengosongkan objek sengketa beserta keluarga dan harta benda termohon eksekusi.

Kemudian jurusita membuat berita acara. Berita acara eksekusi berisi luas objek eksekusi, nama saksi yang membantu eksekusi, nama pejabat yang menjalankan eksekusi, dan berita acara eksekusi tersebut ditandatangani oleh Jurusita, Saksi-saksi, Termohon Eksekusi, kepala desa setempat, dan kepala kecamatan setempat. Salinan berita acara diberikan kepada pihak pemohon eksekusi. Eksekusi tetap dilaksanakan meskipun tanpa hadirnya termohon eksekusi.

D. Faktor yang Mempengaruhi Eksekusi Riil dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa

Berikut ini penyusun akan menguraikan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi eksekusi riil. Adapun faktor yang mempengaruhi eksekusi terdiri dari 2, yaitu faktor yang menghambat eksekusi riil dan faktor yang mendukung eksekusi riil.

1. Faktor yang Menghambat Eksekusi Riil

a. Penundaan Eksekusi atas Alasan Perlawanan

Berdasarkan hasil wawancara penyusun terhadap jurusita. Salah satu penyebab tidak terlaksananya eksekusi adalah adanya gugatan perlawanan yang diajukan termohon eksekusi maupun perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak makmur, Penitera Pengganti Pengadilan negeri Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:

Perlawanan dan *derden verzet* sebenarnya tidak menunda pelaksanaan eksekusi. tapi wewenang ketua pengadilan menunda proses eksekusi dengan melihat permohonan itu. Misalnya dikhawatirkan apabila pengadilan mengesekusi

putusan bisa berbalik. Itu merupakan salah satu alasan ketua pengadilan untuk menunda eksekusi sementara waktu sambil menunggu putusan keluar. Tetapi ada juga permohonan peninjauan kembali yang alasannya dianggap tidak mendasar ketua pengadilan bisa saja melaksanakan eksekusi. apabila ada pemohon eksekusi yang memaksakan eksekusi dilaksanakan, meskipun tidak diatur dalam undang-undang tapi untuk menyelamatkan diri, kita harus membuat perjanjian dengan pemohon eksekusi. Misalnya dua rumah yang akan dieksekusi dalam tanah sengketa, yang sebelum dibongkar ada tim penilai dari pihak pengadilan yang menilai objek sengketa. Kalau umpama seratus juta dalam satu rumah pemohon harus nitip uang jaminan. Kalau besok lusa putusan berbalik, ada jaminannya. Kalau pemohon eksekusi sanggup maka eksekusi dilaksanakan.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:

Apabila termohon eksekusi mengajukan PK (peninjauan kembali), penundaan eksekusi tergantung pada kebijakan pimpinan. Sebenarnya Peninjauan Kembali tidak menghalangi eksekusi tetapi alangkah baiknya kalau eksekusi ditunda, bukan berarti tidak bisa dieksekusi. Biasa penundaan eksekusi dilakukan kalau ada kemungkinan PK dikabulkan. Bagaimana kalau misalnya rumah kita eksekusi, kita sudah bongkar, PKnya dikabulkan. Makanya biasa pimpinan menyuruh menunggu putusan PK keluar. Kecuali putusan PK sudah keluar, putusannya tetap dimenangkan oleh termohon PK, kita langsung lakukan eksekusi. Kita tidak ada rasa takut untuk melaksanakan eksekusi. Sebenarnya bisa juga sementara proses PK tetap kita lakukan eksekusi. Kalau misalnya berupa tanah kosong tidak ditempati artinya tidak ada bangunan di atasnya. Sementara berjalan proses PK Saya eksekusi.¹¹

Berdasarkan wawancara tersebut di atas eksekusi bisa ditunda karena adanya perlawanan peninjauan kembali dan *derden verzet* dengan pertimbangan apabila eksekusi tersebut dijalankan hal tersebut dapat merugikan pelawan eksekusi ketika perlawanannya tersebut dikabulkan. Bahkan sulit mengembalikan objek pada keadaan semula.

Hal ini serupa yang dijelaskan oleh Bapak Makmur bahwa untuk menjamin pihak pelawan eksekusi. Maka dibuat perjanjian dengan pemohon eksekusi. Apabila

¹⁰Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 04 April 2016.

¹¹Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016.

dikemudian hari putusan berbalik maka uang jaminan tersebut digunakan untuk mengganti kerugian pihak pelawan eksekusi.

Pada Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 menegaskan bahwa Permohonan PK (Peninjauan Kembali) tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi atau pelaksanaan putusan. Kata-kata “tidak” dalam pasal 66 ayat 2 ini diartikan “tidak mutlak”, artinya secara kasuistik penundaan eksekusi dapat dilakukan.¹²

Permohonan PK yang sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Selain itu, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, serta dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa PK kemungkinan akan mengabulkannya.¹³

b. Ketiadaan Biaya

Dalam pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Sungguminasa, semua biaya eksekusi di Pengadilan dibebankan kepada pemohon eksekusi sesuai ketentuan Pasal 121 ayat (4) *HIR* atau Pasal 145 ayat (4) *Rbg*, biaya perkara harus dibayar lebih dulu oleh Penggugat. Analog dengan ketentuan tersebut dikaitkan dengan eksekusi, biaya eksekusi dibayar terlebih dahulu oleh pemohon eksekusi. Selama pihak pemohon tidak membayar biaya eksekusi, eksekusi tidak dapat dijalankan. Dilarang pula untuk meminta biaya eksekusi kepada pihak termohon eksekusi.

Selain itu, biaya pengamanan, hingga biaya penyewaan alat dibebankan kepada pemohon eksekusi. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan pemohon eksekusi

¹²Zainal Asikin, *Hukum Acara perdata di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h. 177.

¹³Moh. Taufik Makarou, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 238.

mengakibatkan penghentian eksekusi karena ketiadaan biaya pemohon eksekusi. Biaya eksekusi tersebut semakin tinggi apabila objek yang akan dieksekusi rawan karena semakin banyak pengamanan yang akan diturunkan saat eksekusi. Jangan sampai biaya eksekusinya lebih besar dibandingkan dengan harga objek eksekusi.

Mengenai masalah besarnya biaya pengamanan. Pengadilan tidak ikut campur tentang besarnya biaya pengamanan. Pihak pemohon eksekusi yang bertemu dengan pihak kepolisian untuk menentukan besarnya biaya pengamanan. Tidak adanya standar biaya pengamanan eksekusi dari polisi, jangan membuat aparat penegak meminta biaya pengamanan yang terlalu besar. Oleh karena biaya pengamanan yang besar, menyebabkan pemohon eksekusi tidak dapat memenuhi permintaan tersebut dan mengakibatkan eksekusi tidak terlaksana.

Selain itu, hal yang harus diperhatikan adalah alat yang digunakan untuk eksekusi. Biasanya pada saat hari dan tanggal eksekusi, karena terkendala biaya. Pihak Pemohon Eksekusi tidak menyediakan alat eskavator. Sehingga menghambat eksekusi.

c. Masyarakat Melakukan Perlawanan Secara Fisik

Pada dasarnya setiap orang tidak rela apabila tanah atau rumahnya dieksekusi. Pihak Termohon Eksekusi melakukan perlawanan secara fisik, mendatangkan massa, bahkan ada kasus pihak termohon eksekusi memblokir jalanan agar jurusita tidak bisa masuk ke daerah eksekusi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Bapak Nyerang, Jurusita Pengadilan Sungguminasa beliau mengemukakan bahwa:

Saya pernah memimpin eksekusi di Pallangga. Eksekusinya itu eksekusi pembongkaran rumah. Pada saat rumah dibongkar saya kena lemparan batu. Ada juga kasus lain yang pernah saya tangani yaitu eksekusi pembongkaran

rumah pada saat saya tiba di lokasi eksekusi, pihak termohon eksekusi mempersiapkan busur dan parang panjang. Untuk menghindari jatuhnya korban, maka eksekusi ditunda sampai keadaan lebih aman. Tapi, pada akhirnya saya berhasil melakukan eksekusi setelah berkali-kali datang ke tempat eksekusi. Hanya saja jika dari pihak pengadilan tidak mampu lagi menangani maka beliau meminta bantuan polisi polres. Jika belum bisa tertangani dengan baik lagi maka saya meminta bantuan Kepada Brimob dengan pertimbangan karena alat Brimob jauh lebih lengkap dan personilnya lebih banyak.¹⁴

Dari hasil wawancara di atas, penyusun berpendapat bahwa jurusita mengalami kesulitan menjalankan eksekusi apabila termohon eksekusi bersikap anarkis. Apalagi kalau menyangkut tanah atau pembongkaran rumah. Seharusnya masyarakat tidak bersikap *gantang* (keras hati) dengan menerima putusan pengadilan serta masyarakat harus berhati-hati dalam hal kepemilikan hak milik atas tanah. Disini juga peran pemerintah setempat seperti kepala desa untuk memberikan atau mengarahkan warganya untuk tidak bersikap anarkis.

d. Kesalahpahaman Terhadap Budaya

Masyarakat Kabupaten Gowa merupakan bagian dari suku Makassar yang masih memegang budaya *siri' na Pacce*.

Pesse'Essie (Bugis) atau *pacce* (Makassar) adalah nilai semangat kesetiakawanan dan loyalitas atau kesetiaan terhadap sesama manusia. Sedangkan *siri'* dapat dimaknai sebagai harga diri dan rasa malu.¹⁵

Ada ungkapan yang berbunyi “*punna tena siriknu, paccenu seng pakania*” (kalau tidak ada *siri'*-mu *pacce*-lah yang kau pegang teguh).¹⁶ Ungkapan ini

¹⁴Nyerang, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016.

¹⁵Muh. Abdi Goncing, “Siri' Na Pacce Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis-Makassar Dalam Perspektif Filsafat Sejarah”, h.7. [https://www.academia.edu/3236526/siri na pacce sebuah tinjauan filsafat sejarah](https://www.academia.edu/3236526/siri_na_pacce_sebuah_tinjauan_filsafat_sejarah). (Diakses 10 Maret 2016).

menggambarkan bahwa antara *siri'* dan *pacce* selalu seiring sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Apabila *siri'* dan *pacce* sebagai pandangan hidup tidak dimiliki oleh seseorang, maka akan dapat berakibat orang tersebut bertingkah laku melebihi binatang (tidak punya malu/*siri'*) karena tidak memiliki unsur kepedulian sosial dan hanya mau menang sendiri (tidak merasakan sedih/*pacce*).¹⁷

Tetapi pada kenyataannya masyarakat menyalah artikan arti *siri' na pacce*. Masyarakat tidak mau menerima putusan pengadilan, masyarakat merasa malu apabila kalah dalam berperkara di pengadilan. Hal ini juga dikemukakan oleh Bapak Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Sungguminasa, bahwa:

Faktor yang menghalangi eksekusi adalah solidaritas masyarakat Gowa yang masih kental. Ketika salah satu keluarganya atau kerabatnya hendak dieksekusi, maka mereka itu berkumpul menghalangi proses eksekusi. Bahkan mereka rela mati agar rumah atau tanah tersebut tidak dieksekusi. Sehingga tidak jarang mereka diamankan oleh pihak kepolisian.¹⁸

Padahal sebenarnya nilai *siri' na pacce* tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang negatif seperti kekerasan, akan tetapi *siri' na pacce* yang dimaksud di sini adalah *siri' na pacce* dalam nilai-nilai positif seperti *siri'* dalam nilai kejujuran, tanggung jawab, *pacce* dalam nilai keadilan, disiplin dan lain sebagainya. Sebagai contoh dalam kasus sengketa tanah. Apabila pihak yang bersengketa menanamkan nilai *siri' na pacce* didalam dirinya maka tidak akan ada yang namanya bentrok atau kerusuhan disetiap pelaksanaan eksekusi. Hanya saja rasa kepemilikan yang tinggi menjadikan masing-masing pihak mengklaim bahwa mereka pemilik sebenarnya

¹⁶Syahrul Yasin Limpo. *Profil Sejarah, Budaya dan Pariwisata Gowa* (Cet.I; Ujung Pandang: Intisari, 1995), h.85; dikutip dalam Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa", *el Harakah*, Vol.14, No.2 (2012): h.187.

¹⁷Rizal Darwis dan Asna Usman Dilo, "Implikasi Falsafah Siri' Na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar di Kabupaten Gowa", *el Harakah*, Vol.14, No.2 (2012): h.187.

¹⁸Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 7 Maret 2016.

lahan tersebut. Karena kurangnya nilai *siri'* dalam dirinya salah satu pihak memberanikan diri mengaku sebagai pemilik sebenarnya lahan tersebut.¹⁹

d. Adanya Campur Tangan Pihak Ketiga

Adanya campur tangan pihak ketiga dalam proses eksekusi, yang berasal dari lembaga atau organisasi tertentu menghalangi proses eksekusi dengan alasan salah objek eksekusi atau penambahan luas objek eksekusi.

Bapak Makmur, Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa mengemukakan bahwa:

Pihak termohon eksekusi memanfaatkan mahasiswa untuk menghalau petugas-petugas dari pengadilan untuk mengagalkan eksekusi dengan alasan jurusita melakukan penambahan lahan yang akan dieksekusi. Bahkan sampai melaporkan ke Polda dan harus dengar pendapat di DPR dan segala macam adik mahasiswa tempuh. Perjuangan seperti itu saya kira perjuangan yang sia-sia kalau putusan sudah berkekuatan hukum tetap.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas penyusun berpendapat bahwa Jurusita dalam melaksanakan putusan pengadilan, berpedoman pada isi putusan. Luas objek eksekusi yang tercantum pada putusan, itupula yang akan dieksekusi oleh Jurusita.

Untuk mencegah terjadinya permasalahan luas atau batas objek eksekusi yang tidak sesuai, selama proses di pengadilan negeri sebaiknya dilakukan pemeriksaan setempat yang dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. Jika perlu dihadiri oleh orang-orang yang bebatasan dengan objek sengketa, pemerintah setempat, dan pihak Pertahanan yang mengetahui keadaan objek sengketa.

¹⁹Sumange, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Budaya *Siri'* (Malu) Dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Masyarakat Bugis-Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2014), h. 19.

²⁰Makmur, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 07 Maret 2016

Pemeriksaan setempat dilakukan agar hakim memperoleh kepastian tentang peristiwa yang menjadi objek sengketa.²¹

Kemudian pihak warga sebaiknya membuktikan dalilnya bahwa terjadi penambahan lahan. Dari pada berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menghambat aktifitas pengadilan.

2. Faktor yang Mendukung Eksekusi

a. Pihak Termohon Eksekusi Tidak Melakukan Perlawanan

Dalam beberapa kasus, termohon eksekusi tidak melaksanakan putusan secara sukarela. Namun, pada saat pihak pengadilan dalam hal ini jurusita turun kelapangan untuk melaksanakan eksekusi. Pihak termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan secara fisik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu, Jurusita pada Pengadilan Negeri Sungguminasa menerangkan bahwa:

Biasanya pihak Termohon menerima eksekusi karena menyadari perlawanan fisik membuang-buang waktu, cepat atau lambat yang menjadi objek eksekusi tetap dieksekusi.²²

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan mudah apabila pihak termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan secara fisik. Sudah seharusnya termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan dan mematuhi isi putusan pengadilan sebagai konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan.

²¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), h. 197.

²²Wahyu, Jurusita Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 23 Februari 2016.

b. Dukungan Aparat Penegak Hukum

Dalam pandangan penyusun, peran pihak pengadilan negeri sangat penting dalam melaksanakan putusan hakim. Untuk mealancarkan eksekusi ketua pengadilan atau Jurusita melakukan pendekatan persuasif kepada Termohon Eksekusi agar tidak menghalangi proses eksekusi.

Selain itu, dukungan penuh aparat kepolisian. Polisi bukan hanya penegak hukum, melainkan juga memiliki tugas dan kewenangan lain sebagai penegak keamanan dan ketertiban masyarakat.²³ Aparat kepolisian yang selalu siap dan terlatih diharapkan mampu meredam perlawanan massa pihak Termohon Eksekusi.

Untuk kasus eksekusi yang tingkat kerawanannya tinggi, pihak Jurusita memanggil brimob dengan pertimbangan karena alat brimob jauh lebih lengkap dan personilnya lebih banyak.

Jumlah pengamanan yang turun dikondisikan dengan keadaan lokasi eksekusi. Untuk kasus termohon eksekusi yang menerima putusan biasanya pengamanan hanya menurunkan beberapa personil.



²³Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana, 2012), h. 509.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ruang lingkup eksekusi riil terdiri atas penyerahan barang, melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu perbuatan. Namun, eksekusi riil yang terjadi di lapangan adalah menyerahkan barang tidak bergerak seperti tanah dalam bentuk pengosongan dan pembongkaran.
2. Berdasarkan penemuan di lapangan, prosedur eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa terdiri dari permohonan eksekusi, *aanmaning* (peneguran), sita eksekusi, penetapan eksekusi, dan eksekusi putusan.
3. Adapun faktor yang mempengaruhi eksekusi riil di Pengadilan Negeri Sungguminasa, yaitu:
 - a. Faktor yang menghambat eksekusi riil
 - 1) Penundaan eksekusi atas alasan perlawanan
 - 2) Ketiadaan biaya
 - 3) Masyarakat melakukan perlawanan secara fisik
 - 4) Kesalahpahaman terhadap budaya
 - 5) Adanya campur tangan pihak ke tiga
 - b. Faktor yang mendukung eksekusi riil
 - 1) Pihak termohon eksekusi tidak melakukan perlawanan
 - 2) Dukungan aparat penegak hukum

B. Implikasi

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penyusun juga akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun saran tersebut, yaitu:

1. Aparat penegak hukum memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum khususnya eksekusi riil. Serta memberikan penyuluhan hukum untuk taat terhadap hukum.
2. Pihak termohon eksekusi hendaknya tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain dan tidak melibatkan pihak yang tidak berkepentingan untuk menolak dilaksanakannya eksekusi.
3. Dalam hal eksekusi tidak boleh diabaikan perikemanusiaan dan perikeadilan sebagaimana yang dimaksudkan pada Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2012.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 4, 5 dan 6*. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bachar, Djazuli. *Eksekusi Putusan Perkara Perdata: Segi Hukum dan Penegakan Hukum*. Jakarta: CV Akademika Pressindo, 1995.
- Bayu, Deddi. "Eksekusi Tanah di Gowa Berlangsung Ricuh", *Skalanews.com*, 04 Juli 2012. <http://skalanews.com/berita/nasional/daerah/116829-eksekusi-tanah-di-gowa-berlangsung-ricuh> (07 Maret 2016).
- Bardizbah, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al Mughirah. *Shahih al-Bukhary*. Cet. I: Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz I.
- Bin Musa, Marwan. "Hukum Mengambil Dan Menguasai Hak Orang Lain Secara Zalim (bag.1)". *Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia*, 1 Januari 2013. <https://pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html> (20 April 2016).
- Dani, Umar. *Putusan Pengadilan Non-Executable Proses dan Dinamika dalam Konteks PTUN*. Yogyakarta: Genta Press, 2015.
- Darwis, Rizal dan Asna Usman Dilo. "Implikasi Falsafah *Siri' Na Pacce* Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa", *el Harakah*, Vol.14, No.2 (2012)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005.
- Fatimah, Iin. "Pemulihan Hak Akibat Eksekusi Karena Adanya Putusan Peninjauan Kembali Pada Perkara Perdata". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Fuady, Muhammad Ikram Nur. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa". *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.
- Goncing, Muh. Abdi, "*Siri' Na Pacce* Sebagai Falsafah Hidup Masyarakat Bugis-Makassar Dalam Perspektif Filsafat Sejarah". https://www.academia.edu/3236526/siri_na_pacce_sebuah_tinjauan_filsafat_sejarah. (Diakses 10 Maret 2016).
- Hadikusuma, Hilman . *Kamus Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2005.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- . *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

HIR (Herzine Indonesis Reglemet)

Hizal, Ramli. "Eksekusi Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padang". *Thesis*. Padang: Program Pascasarjana Universitas Andalas, 2012.

Makarou, Moh. Taufik. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Manan, Abdul. "Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata". *Mimbar hukum dan Peradilan*, no.70, 2010.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ketujuh. Yogyakarta: Liberty, 2006.

Rbg (Rechtslegment Buitengewesten)

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.

Serizawa, Ali. "Pengertian Perkara Perdata". *Blog Ali Serizawa*. <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/05/pengertian-perkaraperdata.html> (17 Januari 2016).

Shalihin, Ahmad. "Hak Untuk Mengajukan Upaya Hukum". *Situs Resmi Pengadilan Negeri Manado*. <http://pn-manado.go.id/layanan-informasi/hak-untuk-mengajukan-upaya-hukum.html> (19 januari 2016).

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qura'n*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Binacipta, 1977. Dikutip dalam Neng Yani Nurhayani. *Hukum Acara Perdata*. Cet. I: Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sumange, "Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Budaya *Siri*' (Malu) Dalam Meningkatkan Ketaatan Hukum Masyarakat Bugis-Makassar". *Skripsi*. Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2014.

Supriyadi, Herman. "Pelaksanaan Putusan Perdata dan Pelaksanaannya". *Situs Resmi PA Sarolangun*. <http://pa-sarolangun.go.id/index.php/122-berita2014/464-artikel-waka-3> (05 januari 2015).

Sutantio, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Sofwan, Sri Soedewi Masjcheon. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty, 1980.

Syahrani, Ridwan. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

"Yurisdiksi". *Kamus Besar Bahasa Indonesia online*. <http://kbbi.web.id/yurisdiksi> (03 Maret 2016).

Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyyah: Kapita Selekta Hukum Islam*. dikutip dalam Mukhamad Makhrus. “Analisis Hukum Islam Tentang Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana”. *Skripsi*. Surabaya: Fak. Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009,

